

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan ini diharapkan menjadi pendukung literatur yang meliputi beberapa identifikasi penemuan-penemuan yang saling berkaitan satu sama lain dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

2.1.1 Tinjauan Tentang Dinas Ketenagakerjaan

Dinas merupakan lingkup kerja di bidang pemerintahan yang membidangi pekerjaan tertentu. Dinas Ketenagakerjaan adalah lingkup kerja pemerintahan yang membidangi Ketenagakerjaan, dalam menjalankan fungsinya, dinas ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja, dan pelayanan bagi pemberi kerja. Jadi pada dasarnya dinas ketenagakerjaan berfungsi sebagai fasilitator bagi pekerja dan pemberi kerja.

Dinas tenaga kerja memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab daerah. Untuk tugas-tugas tersebut, Disnaker menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial, jaminan sosial dan pengawasan ketegakerjaan;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. (disnaker.bekasikab.go.id)

2.1.2 Definisi Strategi

Strategi merupakan suatu kerangka atau pondasi arah gerak bagi sebuah organisasi dan elemen-elemen yang saling terlibat untuk merencanakan suatu langkah-langkah dengan memperhitungkan berbagai peluang dan kemungkinan dalam rangka mencapai tujuan yang disepakati. Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Terlepas dari itu, suatu organisasi pemerintahan dalam konteks penelitian ini harus mampu berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakatnya, agar suatu strategi dapat dilaksanakan dengan tepat, dan tidak bertolak belakang dengan keadaan lingkungan yang ada.

Hakikatnya suatu strategi bukanlah proses manajemen yang berdiri sendiri, ini merupakan suatu langkah yang mampu berindikasi pada menggerakkan organisasi hingga masyarakat luas. Strategi harus mampu berkembang untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada di lingkungannya, di mana strategi harus

mampu merespon organisasi terhadap pilihan kebijakan yang akan diambil. Itu sebabnya suatu strategi mempunyai skema untuk mencapai sasaran apa yang akan dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan (Supriatna, 2018:34-35).

Keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, tidak terlepas dari kualitas pelayanan yang diberikan sebab hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi upaya pencapaian tujuan organisasi. (Tatik Rohmawati, 2017:1296)

Senada dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni terkait pengentasan pengangguran di kawasan Cikarang, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh setiap aparatur negara, dalam hal ini adalah Disnaker hingga pemerintah daerah Kab. Bekasi secara luas, mencakup pelaksanaan program atau strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bekasi pun harus berkualitas dan terarah agar sampai pada masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang telah diberikan adalah pendekatan dilihat dari aspek kinerja aparatur. Hal ini dimungkinkan karena suatu aparatur dapat dilihat dari suatu kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu kinerjanya. Karena itu, kinerja aparatur merupakan modal utama yang perlu diperhatikan oleh pemimpin atau kepala dalam suatu instansi atau lembaga.

Hasil dari sebuah kinerja sangat penting untuk diketahui di dalam pelaksanaan suatu organisasi, karena dapat dijadikan sebagai dasar acuan penentu keberhasilan tujuan yang akan dicapai. (Tatik Rohmawati, 2017: 1300)

2.1.2.1 Indikator Strategi

Menurut Geoff Mulgan, “*Publik strategy is the systematic use of publik resources and powers, by publik agencies, to achieves publik goods*”. Pada konteks ini, strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan lebih berbicara terkait penerapan strategi untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009:19).

Peneliti melihat, terdapat keterkaitan antara lima unsur strategi yang dijabarkan oleh Geoff Mulgan dengan judul penelitian yang peneliti pilih, dimana sama-sama membahas suatu strategi yang dilakukan pemerintah atas kebijakan atau program yang akan dilaksanakan. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan juga merupakan strategi publik yang tentunya memiliki perbedaan dengan strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Merujuk pada teori diatas pada intinya Mulgan menilai ada dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan proses implementasinya, di antaranya adalah *power* (kekuasaaan) dan *knowledge* (ilmu pengetahuan).

Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan dan arah penelitian, peneliti menggunakan teori Geoff Mulgan terkait strategi pemerintahan, yang mana dalam pengaplikasiannya terdapat lima indikator untuk menjawab strategi yang diterapkan, berikut adalah indikatornya:

1. *Purpose*

“Why They Should act in the first place: defining the compelling purpose which arise from the gaps between public needs, aspirations and fears and current realities.”

2. *Environments*

“Why there are seeking to achieve their goals, the contexts (present and future) for action and the capacities they have to get things done. It is from the interaction of these two that governments and agencies then define their chosen”.

3. *Directions*

“What they want to achieve: the goals and outcomes that are desirable and achievable (which in the military take the form of the „commander”'s intent” which is written at the top of any order), as well as their relative priorities and sequencing. These in turn define”

4. *Actions*

“How they are to achieve their goals, with detailed strategies, policies, laws and programmes, as well as inspirational leadership to persuade others to commit to the cause. Together these aim to create public value, but since all actions have unexpected results, strategy also depends critically on”

5. *Learning*

“Systems for understanding not just which actions did or didn’t work but also whether there’s a need to rethink purposes, analyses and chosen directions” (Mulgan, 2009:4-5)

Pada intinya, merujuk pada gagasan-gagasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi merupakan rencana yang disusun oleh para pimpinan, atau manajemen puncak (*Top Management*) untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan disepakati, rencana ini bisa meliputi tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu pemerintahan untuk mempertahankan dan menguatkan eksistensi pemerintah atas kebijakan-kebijakannya yang dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai pembanding teori, disini peneliti memilih teori dari Hunger dan Wheelen, yang mana memiliki empat tahapan dalam manajemen strategi, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi/pengendalian. Hunger dan Wheelen berpendapat bahwa pengamatan lingkungan menjadi tahapan tersendiri dalam manajemen strategi. Menurutny, pengamatan lingkungan merupakan langkah yang harus dilakukan sebelum menyusun suatu strategi sehingga ini menjadi langkah tersendiri sebelum ke tahap perumusan strategi.

Jika diamati, memang kedua teori ini memiliki beberapa persamaan, khususnya dari konteks lingkungan, tetapi melalui teori strategi Hunger dan Wheelen, bagian lingkungan menjadi penentu untuk penentuan strategi langkah selanjutnya. Sedangkan Geoff Mulgan yang peneliti pahami ke lima indicator teori saling berkesinambungan satu sama lain.

2.1.2.2 Tahap Penyusunan Strategi

Tahapan penyusunan strategi pada organisasi pemerintahan terdapat dua macam/model pendekatan, yaitu pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*). Untuk model *top down approach*, proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan lebih diprioritaskan pada pendapat-pendapat level atas yang kemudian diturunkan pada tingkat selanjutnya. Sebaliknya, untuk model *bottom up approach*, level bawah dan menengah menjadi titik awal dari proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan. Adapun beberapa langkah untuk menyusun strategi, adalah:

1. Identifikasi Masalah

Sebagai tahap awal untuk menyusun strategi dengan berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Proses identifikasi masalah tersebut dapat dilakukan menggunakan metode brainstorming atau polling pendapat sebagai upaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada

2. Pengelompokan Masalah

Dari tahapan identifikasi masalah di atas akan muncul masalah baru yang beraneka ragam. Maka dari itu untuk mempermudah cara pemecahannya, perlu dilakukannya pengelompokan/pengklasifikasian masalah yang sesuai dengan sifat atau karakter tujuan pengelompokan masalah tersebut.

3. Proses Abstraksi

Setelah kelompok masalah terbentuk, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah-masalah krusial dari tiap kelompok. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis terhadap masalah tersebut guna mencari faktor penyebab timbulnya masalah. Tahap ini memerlukan ketelitian dan kesabaran karena faktor-faktor ini akan disusun bersamaan dengan metode pemecahan masalahnya.

4. Penentuan Cara Pemecahan Masalah

Setelah tahap abstraksi selesai dilakukan, hal berikutnya yang dilakukan adalah menyelesaikan/memecahkan masalah yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Metode atau cara penyelesaian masalah ini harus konkret dan spesifik.

5. Perencanaan Untuk Implementasi

Tahapan untuk menyusun strategi di atas merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Namun hal terpenting dari semua penyusunan tersebut adalah mengimplementasikan seluruh penyusunan strategi yang sudah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Nugraha, 2014:21).

Nugraha menyatakan bahwa untuk menyusun suatu strategi diperlukan setidaknya lima tahapan yang harus dilakukan, yaitu identifikasi masalah, pengelompokan masalah, proses abstraksi, penentuan cara pemecahan masalah, dan perencanaan untuk implementasi.

2.1.3 Program

Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.” Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa : Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran 10 atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes.

Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.4 Tinjauan Pengangguran

2.1.4.1 Pengertian Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi.

Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2000).

2.1.4.2 Jenis-Jenis Pengangguran

a. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sukirno, 1994) :

1. Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh.

Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

2. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal

3. Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja

terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

b. Pengangguran Berdasarkan Cirinya, Pengangguran dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 1994):

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu,

dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2. Pengangguran Tersembunyi Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Pada negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula

para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

4. Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

2.1.4.3 Akibat Buruknya Pengangguran

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek (Sukirno,2000) dimana dua aspek tersebut yaitu :

a. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit.
- 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan perusahaan yang rendah menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi.

b. Akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah :

1. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan
2. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek
3. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Fokus peneliti pada penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dalam mengatasi permasalahan angka pengangguran yang ada di kawasan Cikarang, secara tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Bekasi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

Selama pelaksanaan perannya, Disnaker Bekasi tentunya akan menerapkan strategi Pemerintah, dimana strategipemrintahan itu sendiri merupakan cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Disnaker dalam mengurangi angka pengangguran. Strategi pemerintahan dapat diartikan sebagai bentuk ketahanan nasional dalam mengupayakan berbagai kepentingan nasional.

Maka melalui penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori strategi pemerintahan milik Geoff Mulgan, dimana strategi berguna sebagai sistem yang

dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik. Teori strategi pemerintahan ini memiliki lima indikator sebagai acuan untuk mengkaji permasalahan penelitian, dan dari ke lima indikator tersebut, peneliti mencoba mengurai lebih komperhesif sehingga melahirkan sub indikator, yang peneliti gunakan untuk lebih eksplisit menjawab permasalahan penelitian terkait pengentasan pengangguran, berikut adalah penjelasan terkait gambaran kerangka pemikiran yang peneliti terapkan:

1. *Purpose* (Tujuan)

“Mengapa Mereka Harus Bertindak Pertama: Mendefinisikan tujuan penting yang muncul dari kesenjangan antara kebutuhan, aspirasi dan ketakutan publik serta kenyataan saat ini.” (Mulgan, 2009:4-5)

- a) Misi, adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bekasi akan melakukan serangkaian proses untuk merealisasikan kebijakan guna mengurangi angka pengangguran di Kawasan Cikarang.
- b) Kemampuan, berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Kemampuan disini jika dilihat pada kontek pemerintah kabupaten Bekasi, memiliki wewenang untuk membuat aturan atau program, semisal program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Masyarakat Kawasan Cikarang.

2. *Environments* (Lingkungan)

“Mengapa ada upaya untuk mencapai tujuan mereka, konteks tindakan (saat ini dan masa depan) dan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan sesuatu. Dari interaksi keduanya, pemerintah dan lembaga kemudian menentukan pilihan mereka”. (Mulgan, 2009:4-5)

- a. Peluang, adalah nilai untuk menyatakan seberapa besar terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah kabupaten Bekasi menciptakan peluang kerja bagi masyarakat local kawasan Cikarang.
- b. Sistem, adalah suatu kumpulan komponen atau elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dan telah disepakati. Sistem disini bagaimana pemerintah Kabupaten Bekasi dalam merencanakan dan menjalankan sistem kerja untuk menanggulangi angka pengangguran yang tinggi di Kawasan Cikarang khususnya. Sistem ini dilakukan atau ditunjang oleh perangkat-perangkat pemerintah lain, seperti staff hingga instansi terkait semisal Dinas Ketenagakerjaan.

3. *Directions* (Arahan)

“Apa yang ingin mereka capai: tujuan dan hasil yang diinginkan dan dapat dicapai (yang dalam militer berbentuk 'niat komandan' yang ditulis di bagian atas urutan apa pun), serta prioritas dan tujuan relatif mereka. pengurutan. Hal ini pada gilirannya menentukan” (Mulgan, 2009:4-5)

- a. Koordinasi adalah interaksi yang saling berketerkaitan, dan menyelaraskan proses untuk mencapai makna tertentu. Pada hal ini yakni koordinasi antara pemerintah Kabupaten Bekasi, instansi terkait dengan Masyarakat.
- b. Motivasi adalah dorongan atau pemberian semangat kepada seseorang, atau dalam hal ini kepada staff hingga Masyarakat, yang mana setiap pihak saling terkolerasi untuk menciptakan ekosistem pekerjaan yang ideal.
- c. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dengan maksud untuk mencapai pemahaman yang sama. Pada penelitian ini pemerintah daerah akan membangun komunikasi kepada organisasi, staff hingga Masyarakat untuk mensosialisasikan program yang akan digagas.
- d. Perintah merupakan permintaan sesuatu kepada seseorang, dalam hal ini pemerintah sebagai pemilik wewenang untuk memberikan perintah kepada staff atau instansi terkait untuk Bersama-sama melakukan strategi kebijakan guna mengurangi angka pengangguran

4. *Actions* (Tindakan)

“Bagaimana mereka mencapai tujuan mereka, dengan strategi, kebijakan, undang-undang dan program yang terperinci, serta kepemimpinan yang inspiratif untuk membujuk orang lain agar berkomitmen pada tujuan mereka. Semua hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai publik, namun

karena semua tindakan memiliki hasil yang tidak diharapkan, strategi juga sangat bergantung pada” (Mulgan, 2009:4-5)

- a. Pengambilan Keputusan, adalah proses pemilihan Tindakan untuk mengatasi suatu konteks atau peristiwa tertentu. Pada penelitian ini peneliti akan mengamati bagaimana Upaya atau Keputusan pemerintah dalam menciptakan Solusi-solusi atas setiap permasalahan pengangguran.
- b. Sarana adalah suatu perangkat atau tempat yang bisa dimanfaatkan dalam mencapai maksud yang diinginkan. Sarana pada penelitian ini dapat berupa perangkat kebijakan atau suatu program pelatihan kerja bagi Masyarakat Kawasan Cikarang dalam meningkatkan kompetensinya.

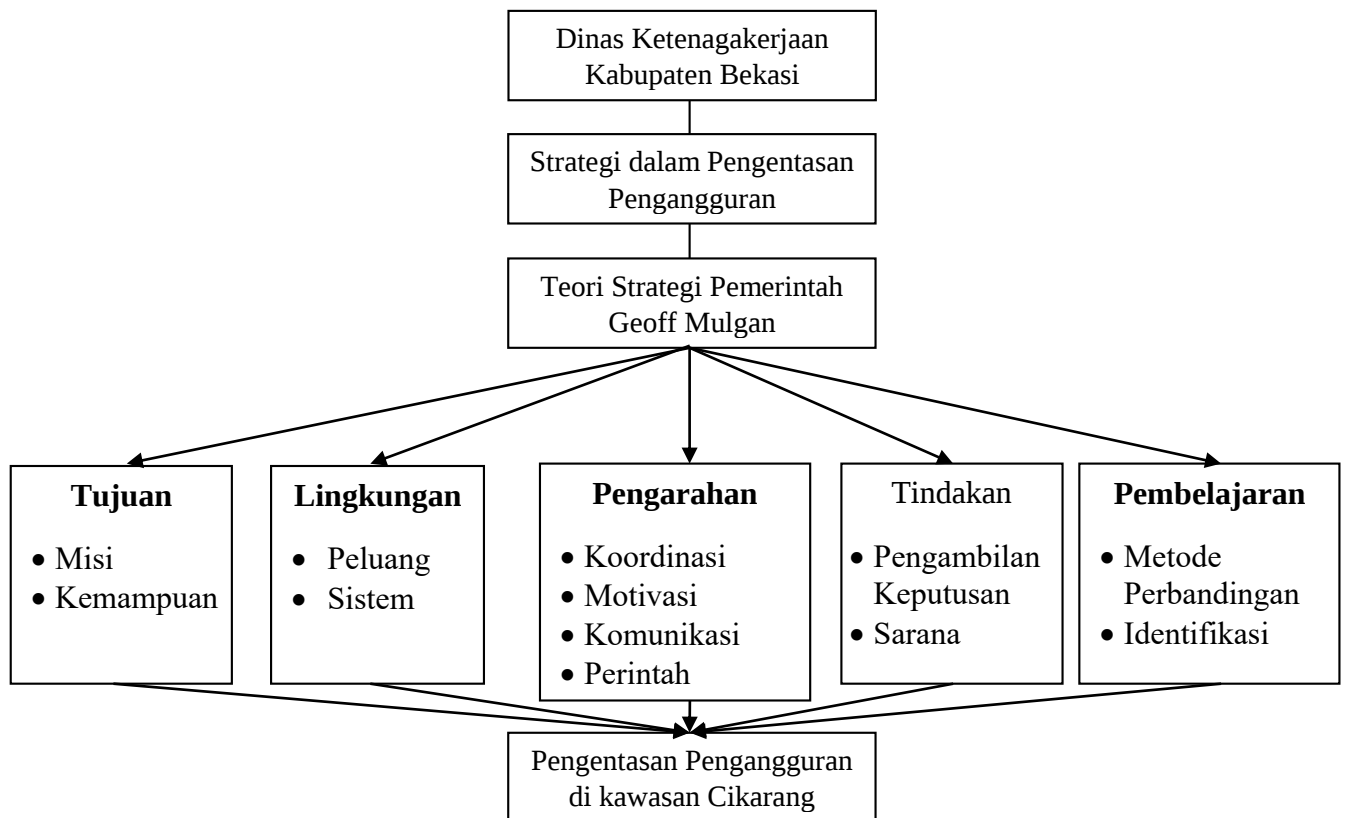
5. *Learnings* (Pembelajaran)

“Sistem untuk memahami tidak hanya tindakan mana yang berhasil atau tidak, tetapi juga apakah ada kebutuhan untuk memikirkan kembali tujuan, analisis, dan arah yang dipilih” (Mulgan, 2009:4-5)

- a. Metode Perbandingan, adalah suatu pendekatan atau cara untuk melakukan suatu perbandingan dari beberapa objek yang akan di pilih. Dalam hal biasanya pemerintah daerah kabupaten Bekasi akan melakukan pengkajian dari setiap alternatif proses atau kebijakan yang dicari apakah akan sesuai jika diterapkan dalam suatu kebijakan.
- b. Identifikasi, adalah proses untuk mengenali, menemukan dan menentukan karakteristik suatu hal, pada kajian penelitian ini peneliti

akan melakukan identifikasi terkait strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bekasi, untuk ditelusuri efektif atau tidaknya suatu program dibuat.

Gambar 2. 1
Model Kerangka Pemikiran Strategi Pemerintah Model Geoff Mulgann



(Sumber : peneliti 2024)

2.3 Proposisi

Proposisi dalam penelitian ini adalah Strategi Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bekasi dalam Program Pengentasan Pengangguran di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang dikaji dengan Purpose, Environment, Direction, Act dan Learning.